

PENERAPAN PSAK NO. 102 PADA SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

MURABAHAH PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG

PEKANBARU

SKRIPSI

Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi, guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam UIN SUSKA Riau.



DISUSUN OLEH :

ROFA DIANA

NIM : 10825003655

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAH ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PENERAPAN PSAK NO. 102 PADA SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU”

Adapun yang menjadi latar belakang penulis mengambil judul ini adalah Dalam dunia perbankan akuntansi merupakan hal yang sangat diperlukan sebagai bahan mengukur kinerja sekaligus laporan pada pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan termasuk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang menyangkut dalam masalah pembiayaan *murabahah*, dimana penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* umumnya harus mengacu pada ketentuan PSAK no. 102 dengan aktivitas akuntansinya meliputi Penetapan margin, penetapan denda dan lain sebagainya, sehingga dapat dilihat kelayakan dalam aktivitasnya sehingga tidak tersentuh riba.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan apakah penerapan akuntansi *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ditinjau menurut PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan penerapan akuntansi *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ditinjau menurut PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*

Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Sebagai sampel adalah 3 orang penyelia bagian pembiayaan *murabahah*. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Sedangkan metode penulisan data dilaksanakan secara deskriptif bertujuan untuk memperoleh secara jelas tentang suatu situasi atau keadaan tertentu dan

metode induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif, disebut induktif bila bertolak dari pernyataan tunggal seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan pernyataan universal.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Secara prinsip sistem akuntansi yang diterapkan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dapat dikatakan tidak bermasalah namun pembiayaan yang disalurkan kurang sesuai dengan kemurnian akad *murabahah* didalam islam melihat barang yang dibeli tidak 100% dibiayai oleh Bank, disamping masih terdapat penyimpangan yang tergambar atas dasar banyaknya pembiayaan macet yang diakibatkan kurangnya penyaringan terhadap nasabah sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur hanya kepada Allah Swt, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“PENERAPAN PSAK NO. 102 PADA SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang penuh cahaya iman dan Islam.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahnda Rafaat Husin dan Bunda serta Paman yang tercinta, yang selalu mencintai ananda dengan sepenuh hati serta rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan ananda.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. M. Nazir Karim, MA., selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya dikampus UIN SUSKA RIAU ini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, MA., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta ibu Dr. Hertina, M. Pd., selaku Pembantu Dekan I, H. Mhd Kastulani, S.H., MH., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B., M.A., selaku Pembantu Dekan III.
4. Yang terhormat Bapak Mawardi, S. Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.A., selaku Seketaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Yang terhormat Bapak Jonius, SE, MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan hati

dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Yang terhormat Bapak / Ibu para dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Yang terhormat Bapak / Ibu pengurus Gapoktan Kampar Makmur di Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar yang sudi memberikan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, serta Pustaka Wilayah Riau "Soeman H.S.".
9. Karib kerabat, sahabat dan berbagai pihak yang telah turut membantu dan memotivasi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama Bapak/ibu, Saudara/i dan rekan-rekan sekalian dibalas oleh Allah Swt. Dan senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, akhirnya, terkandung harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, dan kepada Allah Swt. Penulis menyerahkan diri dan mohon pertolongan.

Pekanbaru, 18 Juni 2013

Penulis

ROFA DIANA

NIM: 10825003655

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	14
A. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.....	14
B. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.....	15
C. Aktivitas Perusahaan.....	16
1. Produk Pendanaan.....	17
2. Produk Pembiayaan	18
3. Produk Jasa	21
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBIAYAAN MURABAHAH	23
A. Lembaga Keuangan Syariah.....	23
1. Lembaga keuangan Bank syariah	24
2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	28

B. Produk Perbankan Syariah	29
1. Produk Penyaluran Dana.....	29
2. Produk Penghimpunan Dana.....	33
3. Jasa Perbankan	33
C. Pembiayaan Murabahah	33
D. Akuntansi Perbankan Syariah.....	36
1. Asumsi Dasar	37
2. Akuntansi Murabahah	37
E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102	
Tentang Murabahah	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT. Bank BNI	
Syariah Kantor Cabang Pekanbaru	56
B. Tinjauan PSAK 102 Terhadap Akuntansi Pembiayaan	
Murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah industri perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Prinsip-prinsip yang mendasari pembiayaan bank syariah antara lain prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan pengambilan *fee*. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus¹, Dari sekian banyak prinsip tersebut, prinsip jual beli dan bagi hasil yang paling menonjol dan menjadi *trademark* dari produk-produk bank syariah.

Terkait dengan perbankan syariah, dalam undang-undang yang sama dinyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran².

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada Oktober 2012, komposisi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 97.

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 60.

Tabel I.1
Rincian Pembiayaan Perbankan Syariah
(Miliar Rupiah)

Pembiayaan	2010	%	2011	%
<i>Mudharabah</i>	8,631	12,65	10,229	9,99
<i>Musyarakah</i>	14,624	21,45	18,960	18,47
<i>Murabahah</i>	37,508	55,00	56,365	54,91
<i>Salam</i>	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	347	0,51	326	0,31
<i>Ijarah</i>	2,341	3,43	3,839	3,72
<i>Qardh</i>	4,731	6,96	12,937	12,6
Lainnya	0	0	0	0
Total	68,182	100	102,656	100

Sumber: Statistik BI, Oktober 2012

Dari data tersebut jelas bahwa jual beli dengan akad *murabahah* menunjukkan posisi lebih dari 50%. Dominasi akad pembiayaan *murabahah* tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dengan ditambah rujukan dari fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah), dijelaskan bahwa bunga bank lembaga keuangan konvensional, termasuk didalamnya bank konvensional, termasuk riba yang haram hukumnya, karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *return*-nya dapat diperkirakan dan mempermudah *Assets And Liability Management* (ALMA) karena sumber DPK (Dana Pihak Ketiga) sebagian besar berasal dari dana berjangka pendek³.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru adalah lembaga keuangan yang terletak di pusat kota sehingga memungkinkan bagi para pengusaha atau pegawai untuk menikmati jasa perbankannya. Sifat usaha para pengusaha tersebut yang sedang potensial di Pekanbaru ini namun masih

³ Yusak Laksmiana, *Account Officer Bank Syariah memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 5.

tergolong sederhana dan terbatas, baik modal maupun manajemennnya maka PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru merupakan alternatif pendukung bagi berkembangnya usaha dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu elemen utama yang menjadi perantara terwujudnya amanah yang diemban diantara pembiayaan lain yang disalurkan. Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ini pembiayaan *murabahah* menempati peringkat atas disamping pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel Rincian Pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel I.2
Rincian Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru
(Milliar Rupiah)

Pembiayaan	2010	%	2011	%
<i>Murabahah</i>	2.553	78,19	3.142	75,69
<i>Mudharabah</i>	87,3	2,67	90,3	2,17
<i>Musyarakah</i>	624,8	19,14	919	22,14
Total	3.265,1	100,00	4.151,3	100,00

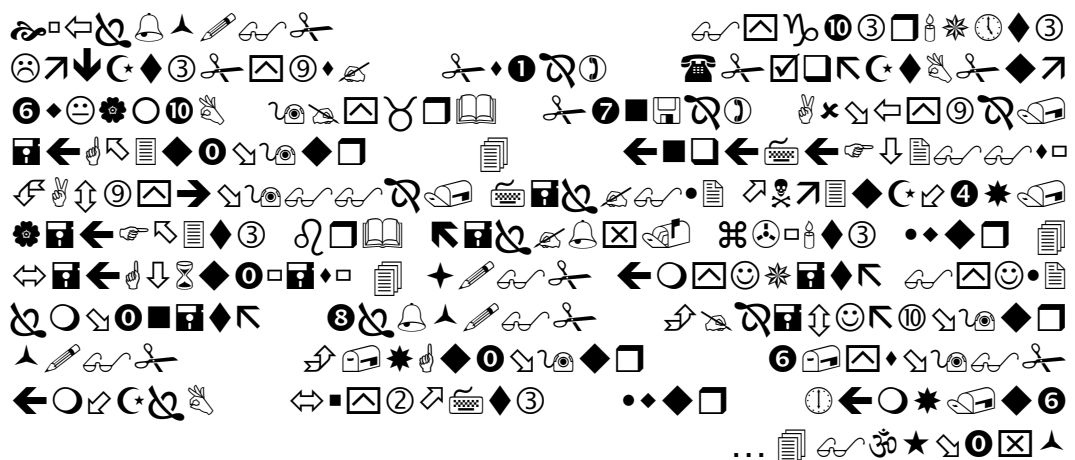
Sumber: PT. Bank BNI Syariah Persero Tbk (Data diolah)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan yaitu dari 78,19% menjadi 75,69% dari total pembiayaan yang ada, tetapi penurunan tersebut tidak begitu drastis dan masih menempatkan pembiayaan *murabahah* pada posisi yang dominan dari seluruh pembiayaan⁴. Berdasarkan prariset yang telah penulis lakukan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru hal ini disebabkan oleh kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, dimana kebutuhan yang paling

⁴ Bank BNI Syariah, 2011, *Annual Report*, www.bnisyariah.co.id, Rabu 3 maret 2013.

mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan. sehingga nasabah lebih dominan memilih pembiayaan *murabahah* yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabng Pekanbaru

Salah satu alat yang diperlukan sebuah institusi keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait adalah akuntansi. Sehingga perkembangan institusi keuangan tersebut juga berdampak pada perkembangan akuntansi itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa akuntansi dan institusi baik institusi keuangan atau bukan saling terkait. Sehingga menjadi keniscayaan hadirnya perbankan syariah membutuhkan akuntansi syariah. Walaupun bukan berarti akuntansi syariah lahir karena perbankan syariah. Islam bersikap sangat jelas terhadap akuntansi⁵. Melalui surat al-Baqarah: 282, Allah menegaskan :



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka, hendaklah ia mencatat dan hendaklah yang berhutang itu mengimlakkan apa yang dicatat. Dan, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan, janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya.”

⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.168.

Untuk saat ini perbankan syariah di dunia mengacu pada *Statement of Financial Accounting* (SFA) yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB). Lembaga ini adalah bagian dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)⁶. Sedangkan di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah juga harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang akuntansi *murabahah*. Pedoman ini berisi semua hal terkait pencatatan akuntansi dengan akad *murabahah* yang menurut proyeksi trend pembiayaan kedepan, yaitu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan.

Penyajian akuntansi *murabahah*, yaitu⁷:

1. Piutang *murabahah* disajikan pada akhir periode akuntansi Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang
2. Margin *murabahah* ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru merupakan salah satu bank umum syariah yang fungsinya melayani pembiayaan, deposito, tabungan dan giro dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan Islam PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru mengemban dua amanah utama, yaitu mendukung dan

⁶ Taufik Arsad Mawardi, *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta*, (Jakarta: STEI SEBI, 2005), h.10.

⁷ *Ibid.* 58.

memajukan usaha perekonomian rakyat kecil menengah serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, pegawai dan para nasabah.

Dengan besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru maka diperlukan pencatatan akuntansi yang lebih kompleks dengan tujuan untuk menjaga pembiayaan yang diberikan agar tetap lancar, produktif dan tidak macet.

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada **“Pembiayaan *murabahah* dengan pengkajian akuntansi pembiayaan *murabahah* secara teoritis berpedoman pada PSAK Nomor 102 tentang akuntansi *murabahah*”**.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ?

2. Apakah sistem akuntansi *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ditinjau menurut PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi *murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ditinjau menurut PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi pembiayaan *murabahah* terkait proses dan penerapan akuntansinya dan dapat mengetahui sinkronisasi antara teori pembiayaan *murabahah* dengan kenyataan riil pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari perbankan syariah dan juga PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

2. Bagi Objek

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas produk yang telah dikeluarkan dan dijalankan selama ini untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

3. Bagi Akademik

Dapat mengetahui informasi tentang sistem pengendalian pembiayaan *murabahah* terhadap suatu lembaga keuangan serta juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, bahan diskusi dan wacana informasi dan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syariah (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 484 Pekanbaru Riau 26126. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan dengan pertimbangan besarnya dominasi dari akad *Murabahah* yang disalurkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Pekanbaru yang memerlukan pencatatan akuntansi yang lebih kompleks

2. Subjek Dan Objek

- a. Subjek penelitian ini adalah Divisi *Accounting* pembiayaan murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.
- b. Objek penelitian ini adalah Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

3. Informan (key informen)

Yang menjadi informan (Key Informan) dalam penelitian ini adalah Divisi *Accounting* pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

4. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan sumber data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya ⁸. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan pihak yang terkait khususnya para karyawan bank yang menangani bagian yang terkait dengan pembiayaan

⁸ Fike Mai Mandasari, *Sistem Pengendalian Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Bhakti Jaya Malang, Universitas Islam Negeri Malang*, (Malang, 2008), h.76.

- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan⁹. Data sekunder terdiri dari hasil laporan atau profil PT. Bank BNI Syariah (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru, serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap PT. Bank BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU.
- b. Interview (wawancara), yaitu proses memperoleh data yang diperlukan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)¹⁰
- c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, transkrip, surat kabar, agen dan sebagainya¹¹. Dokumen tersebut di antaranya mengenai profil PT. Bank BNI Syariah (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru, dokumen-dokumen dan

⁹ *Ibid.* h.77.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* h.78

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*

- d. Studi pustaka, yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada kaitannya dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori untuk membahas masalah yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik yang digunakan serta tempat dan waktu penelitian maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisa data menggunakan pendekatan deskriptif (narasi), yakni analisa atas dasar-dasar persamaan jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Metode deskriptif bertujuan untuk memperoleh secara jelas tentang suatu situasi atau keadaan tertentu¹²
- b. Metode induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan

¹² www.blog.uin-malang.ac.id. Imamul Muttaqin, *Metode Deskriptif*, Rabu 13 Maret 2013.

yang luas diterima, ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif, disebut induktif bila bertolak dari pernyataan tunggal seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan pernyataan universal¹³.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan maka peneliti membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II IDENTIFIKASI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru baik struktur organisasinya, akuntansi pembiayaan *murabahah* maupun aktivitasnya dalam menjalankan usaha perbankan

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis meliputi lembaga keuangan syariah, produk perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* akuntansi syariah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

¹³ www.writes.blogspot.com. Rositayanti, *Metode Ilmiah: Deduktif & Induktif*, rositayanti, Rabu 13 Maret 2013.

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan sistem akuntansi *murabahah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru disertai tampilan layar untuk input data pembiayaan dalam sistem akuntansi yang telah dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang ada, serta keterbatasan dalam penulisan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

Pada tanggal 29 April 2000, PT Bank BNI Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespons kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dimulai dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Pada tahun 2002, UUS BNI menghasilkan laba pertama sebesar 7,189 miliar rupiah dengan dukungan tujuh cabang. Pada periode 2003 – 2004, berturut-turut UUS BNI mendapatkan penghargaan *the most profitable bank* di antara dua BUS dan delapan UUS.

Pada tahun 2009, pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah sebagai implementasi dari UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didukung dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional. Pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan asset 6,4 triliun rupiah, naik 21% dari Juni 2010.

Pada tahun 2011, PT Bank BNI Syariah membukukan laba 66 miliar rupiah dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas serta lebih dari 1.000 *Syariah Channelling Outlet* BNI (SCO BNI) dengan total asset 8,4 triliun rupiah pada akhir Desember 2011¹.

Adapun Visi PT. Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Sedangkan Misi PT. Bank BNI Syariah², yaitu:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

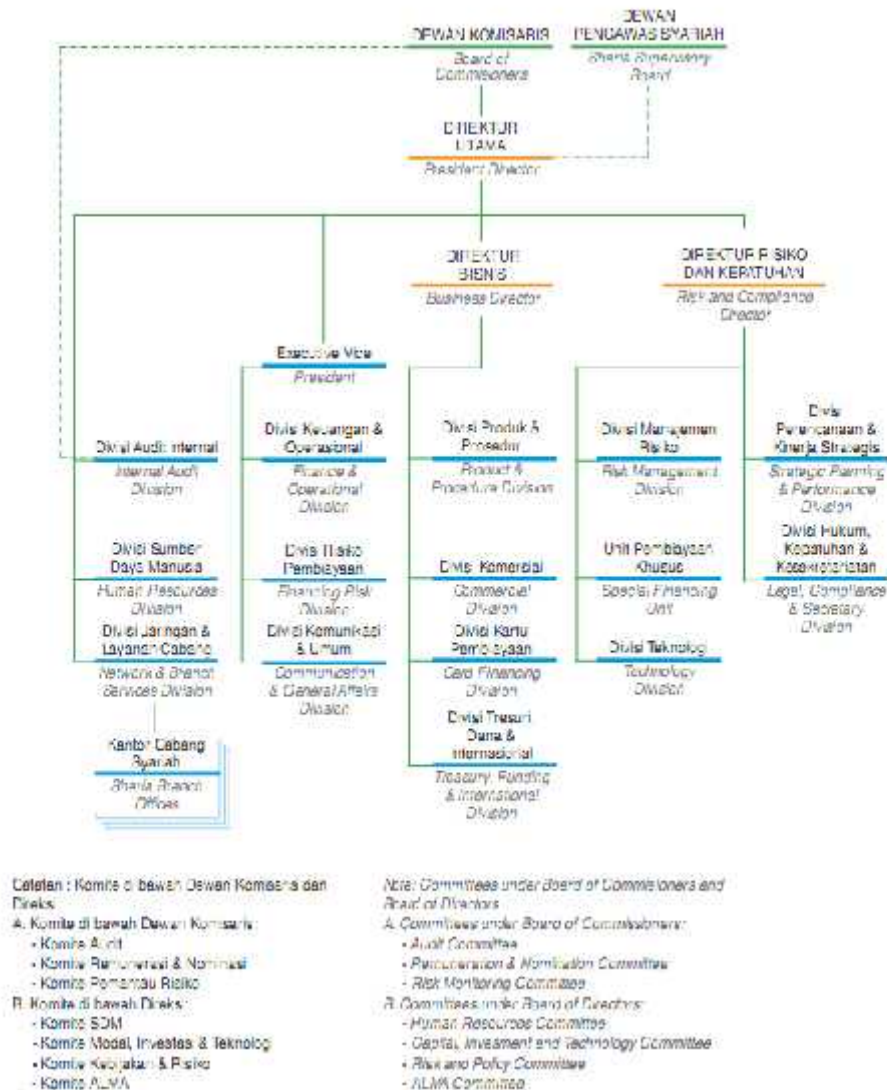
B. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris nomor KOM/01 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Direksi nomor KP/DIR/26/R tanggal 25 Agustus 2010, maka struktur organisasi BNI Syariah adalah sebagai berikut:

¹Bank BNI Syariah, 2011, *Annual Report*, www.bnisyariah.co.id , Rabu 13 Maret 2013.

² *Ibid.*

Gambar II.1
Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru



Sumber: PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru

C. Aktivitas Perusahaan

PT. Bank BNI Syariah menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil hingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, fleksibilitas dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Apa pun segala kebutuhan anda mulai dari produk pembiayaan, produk

investasi, produk simpanan dan jasa-jasa perbankan lainnya, kami siap memberikan yang terbaik sesuai dengan prinsip syariah yang dijalankan secara professional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia. Produk-produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru³, yaitu:

1. Produk pendanaan

- a. Tabungan iB THI Hasanah, dengan prinsip *wadi'ah* (titipan) yang didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
- b. Tabungan iB Hasanah, dengan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) merupakan tabungan transaksional yang dilengkapi dengan kartu ATM serta didukung *e-banking* seperti *internet banking*, *SMS banking* dan *phone banking* untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat digunakan untuk mahasiswa dan *community card*
- c. Tabungan iB Prima Hasanah, dengan prinsip *mudharabah* didesain untuk nasabah yang membutuhkan fasilitas lebih dilengkapi dengan asuransi jiwa dan fasilitas *executive lounge* di bandara kota-kota besar Indonesia
- d. Tabungan iB Tapenas Hasanah, dengan prinsip *mudharabah* merupakan tabungan berjangka, didesain untuk membantu perencanaan pendidikan serta kebutuhan masa depan nasabah yang dilengkapi dengan asuransi jiwa bebas premi
- e. Tabungan iB Bisnis Hasanah, dengan prinsip *mudharabah* merupakan tabungan untuk usaha kecil atau usaha perorangan dengan mutasi rekening

³BNI Syariah Produk , www.bnisyariah.co.id, Rabu 13 Maret 2013.

yang lebih detail dalam buku tabungan dilengkapi dengan kartu ATM *gold* dan fasilitas *executive lounge*

- f. TabunganKu iB, dengan prinsip *wadi'ah* merupakan tabungan nasional dengan setoran awal yang ringan dan bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat
- g. Giro iB Hasanah, dengan prinsip *wadi'ah* adalah simpanan transaksional yang dilengkapi dengan rekening giro yang dilengkapi dengan fasilitas cek atau bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan
- h. Deposito iB Hasanah, dengan prinsip *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah atau dolar yang ditujukan untuk investasi

2. Produk pembiayaan

- a. iB Hasanah Card, kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat *fix*, adil, transparan dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga. iB Hasanah Card tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan dan kegiatan usaha
- b. Griya iB Hasanah, dengan prinsip *murabahah* (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah indent, dengan

sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya

- c. Oto iB Hasanah, dengan prinsip *murabahah* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor
- d. Talangan Haji iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan setoran awal untuk mendapatkan *seat* sesuai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diatur Kementerian Agama dengan menggunakan akad *ijarah*. Talangan Haji iB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB THI Hasanah
- e. Gadai Emas iB Hasanah, atau disebut juga pembiayaan *rahn*, merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas batangan didukung administrasi dan proses persetujuan yang mudah
- f. Multijasa iB Hasanah, dengan prinsip *ijarah* (sewa beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pendanaan dengan jaminan *fix asset* untuk maksimal pendanaan 500 juta rupiah
- g. Mutiguna iB Hasanah, dengan prinsip *murabahah* untuk pembelian barang kebutuhan di kalangan profesional atau pegawai aktif
- h. Fleksi iB Hasanah, dengan prinsip *murabahah* atau *ijarah* untuk karyawan suatu perusahaan
- i. CCF iB Hasanah, dengan prinsip *murabahah* atau *ijarah* untuk karyawan suatu perusahaan

- j. Wirausaha iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah
- k. Tunas Usaha iB Hasanah, adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah
- l. Linkage Program iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS dan lainnya kemudian disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping
- m. Kopkar atau Kopeg iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan *mudharabah* di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) atau Koperasi Pegawai (Kopeg) kemudian disalurkan secara prinsip syariah kepada *end user* atau karyawan
- n. Usaha Kecil iB Hasanah, adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah
- o. Usaha Besar iB Hasanah, adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha

berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang rupiah maupun valas

- p. Sindikasi iB Hasanah, adalah pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek atau usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula
 - q. Multifinance iB Hasanah, adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
 - r. Pembiayaan Kerjasama dengan *Dealer* iB Hasanah, merupakan pola kerjasama pemasaran dengan *dealer* dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak
3. Produk jasa dan layanan
- a. *Payroll* gaji, adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya ke rekening karyawannya
 - b. *Cash Management*, adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti *corporate internet banking* yang dapat digunakan oleh perusahaan, lembaga atau instansi. Produk ini dilengkapi dengan fasilitas *virtual account*

c. *Payment Center*, adalah kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya⁴.

⁴BNI Syariah Produk layanan , www.bnisyariah.co.id, Rabu 13 Maret 2013.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai¹, padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syariat orientasi nilai.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum, asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas

¹ Muhamad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 5.

mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Secara garis besar dapat digambarkan di bawah ini lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada², yaitu :

1. Lembaga Keuangan Bank Syariah

- a. Bank Syariah

Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits³.

Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam⁴. Menurut syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan sistem bunga. Dasar hukum (dalil rujukan), yaitu⁵:

1. Al-Baqarah: 275

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

²*Ibid* .

³ Karnaen Perwaatmatdja, dkk, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1997), h. 1.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-4, h.5.

⁵ *Ibid*.

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2. Ar-Rum: 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah (keridhaan) Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa⁶:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank syariah di negara-negara Islam perkembangannya mempengaruhi Indonesia pada awal periode 1980-an. Diskusi mengenai bank syariah sebagai

⁶ Wikisource, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, www.id.wikisource.org, Kamis 21 Maret 2013.

pilar ekonomi Islam mulai dilakukan para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut seperti Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A. M. Syaifuddin, M. Amin Azis dan lain-lain. Uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan diantaranya oleh Baitul Tamwil Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan, di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi Ridho Gusti.

Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22 sampai 25 Agustus 1990-an. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Adapun tujuan dibentuknya bank syariah adalah⁷:

- a. Untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba, jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam Islam dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat

⁷Warkum Sumitro, *op.cit*, h. 17.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, melalui pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi, supaya tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin)
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama terhadap kelompok miskin yang di arahkan menuju kegiatan usaha produktif sehingga terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha)
- d. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan yang merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank

Tujuan pendirian Bank Islam menurut Arifin pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait⁸.

b. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Menurut undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada UU Perbankan No. 10 tahun

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009) h. 3.

1998. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/ tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah.

2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga keuangan non bank terdiri dari :

a. Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, “*insurance*”. Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-tamin* yang secara bahasa berarti *tuma’ ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Pengertian asuransi syariah menurut fatwa (Dewan Asuransi Syariah Nasional) DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah⁹.

b. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, www.mui.or.id, Selasa 9 April 2013.

c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk, sedangkan Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

B. Produk Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu¹⁰:

1. Produk Penyaluran Dana

Produk peyaluran dana pada nasabah secara garis besar dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan

¹⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cet ke-8, h. 97.

bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Produk yang ditawarkan adalah:

- *Murabahah*

Sering juga disebut *al Bai bitsaman ajil*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

- Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dalam transaksi ini kualitas, kuantitas harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti sehingga tidak seperti jual ijon.

- Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara *al mustashni* (pembeli) dan *as shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa

pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. *Ijarah* adalah akad sewa - menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (investasi)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

- *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud.

- *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya

kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. *Mudharabah* terdiri dari dua bentuk yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat)

d. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Produk ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan

- *Hiwalah* (Alih hutang piutang)

Bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapati ganti atas jasa pemindahan piutang

- *Rahn* (gadaai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan

- *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang kepada nasabah yang digunakan untuk keperluannya dengan hanya mengembalikan biaya pokok

- *Wakalah*

Wakalah adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu

- *Kafalah*

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan adalah *wadiah* dan *mudharabah*. Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada prinsipnya *wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sedangkan pada *wadiah yad amanah*, barang titipan tidak boleh dimanfaatkan. *Wadiah* sendiri adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan

3. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediasor antara *defisit unit* dengan *surplus unit*, bank syariah juga melakukan pelayanan jasa perbankan dengan memperoleh imbalan seperti *sharf* dan *ijarah*. *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (diluar jual bank notes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan melindungi nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

C. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan menurut Muhammad secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi

yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain¹¹.

Ada dua macam tujuan dari pembiayaan, yaitu¹²:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* tercapai tanpa hambatan.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan engan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan sesuatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu kedua belah pihak harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan, jual beli antara kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada ditangan pemesan.

¹¹Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h. 260.;

¹²Veithzal Rivai, *Islamic Financial management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5.

Ada beberapa landasan terhadap pembiayaan *murabahah*, yaitu¹³:

- a. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu..

- b. Kemudian firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275, yang artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dalam melakukan jual beli *murabahah* Ada beberapa Syarat-syarat *murabahah*, diantaranya¹⁴:

- a. Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjualbelikan (*Mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

¹³ *Ibid*, h. 146.

¹⁴ *Ibid*, h. 147.

- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

D. Akuntansi Perbankan Syariah

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha dan dasar akrual¹⁵. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan¹⁶. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi

¹⁵Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 84.

¹⁶*Ibid*, h. 85.

pemakai dalam pengambilan keputusan. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Adapun tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah:

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain. Sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kejujuran, keadilan, kebajikan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

2. Akuntansi *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102, *Akuntansi Murabahah*)¹⁷.

Ada beberapa syarat-syarat dalam *murabahah* yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian), mengetahui harga pertama adalah syarat sahnya transaksi *murabahah*
- b. Mengetahui keuntungan, keuntungan adalah bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli
- c. Modal hendaklah dari komoditi yang memiliki kesamaan dan sejenis

¹⁷Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 129.

- d. Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak dinisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama
 - e. Transaksi pertama haruslah sah
- Beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli *murabahah*, yaitu:
- a. Menurut sebagian besar ulama Hanafiyah, jika cacat yang ada di atas kehendak manusia, maka ia diperbolehkan menjualnya dengan harga utuh tanpa menjelaskan bagian yang cacat
 - b. Zufar dan sebagian besar ulama mengatakan bahwa barang yang cacat tidak dijual secara *murabahah* sehingga menjelaskan cacat tersebut untuk mencegah adanya unsur khianat
 - c. Jika cacat tersebut hasil perbuatan si pembeli atau orang lain, maka tidak boleh dijual secara *murabahah* sehingga cacat tersebut dijelaskan. Ini adalah kesepakatan para ulama
 - d. Apabila membeli sesuatu secara angsur (*nasi'ah*), maka tidak boleh menjualnya secara *murabahah* sehingga menjelaskannya

Berikut ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000¹⁸:

Pertama: Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

- 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam
- 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, 2010, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, www.mui.or.id, Selasa 9 Maret 2013.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Kedua: Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga: Jaminan dalam *murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Keenam: Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Berkenaan dengan uang muka, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah* tertanggal 16 September 2000 sebagai berikut¹⁹:

1. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
3. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lembaga keuangan syariah dari uang muka tersebut
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, lembaga keuangan syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, lembaga keuangan syariah harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah

Sedangkan dalam himpunan fatwa yang sama terdapat aturan mengenai diskon dalam *murabahah* yaitu fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut²⁰:

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah
2. Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*, www.mui.or.id, Rabu 17 Maret 2013.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Aturan Mengenai Diskon Dalam *Murabahah*, www.mui.or.id, Rabu 17 Maret 2013.

3. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS (Lembaga Keuangan Syariah) mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu diskon adalah hak nasabah
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani

Dewan Syariah Nasional juga menetapkan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana tercantum dalam fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, yaitu²¹:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani

²¹ Majelis Ulama Indonesia, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-menunda Pembayaran, www.mui.or.id, Rabu 17 Maret 2013.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Murabahah

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

NO. 102 AKUNTANSI MURABAHAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Ruang Lingkup

2. *Pernyataan ini diterapkan untuk:*

- (a) *lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan*
- (b) *pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.*

3. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara

lain, adalah:

- (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan
- (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*.

4. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.*

Definisi

5. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).

Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.

Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Karakteristik

6. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
7. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

8. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
9. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
10. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
 - (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.

14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
- (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:

(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan

(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;

(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

(c) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau

(d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
- (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

22. *Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.*

23. *Keuntungan murabahah diakui:*

- (a) *pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau*
- (b) *selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:*

i. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas

dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

ii. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) ii, dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.
25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran

selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun Angsuran (Rp) Pokok (Rp) Keuntungan (Rp)

1 500,00 400,00 100,00

2 300,00 240,00 60,00

3 200,00 160,00 40,00

26. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau

(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

(a) *jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;*

(b) *jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.*

29. *Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.*
30. *Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:*
- (a) *uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;*
 - (b) *jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);*
 - (c) *jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .*

AKUNTANSI UNTUK PEMBELI AKHIR

31. *Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).*
32. *Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.*
33. *Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.*

34. *Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.*
35. *Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.*
36. *Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.*

PENYAJIAN

37. *Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.*
38. *Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.*
39. *Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.*

PENGUNGKAPAN

40. *Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:*
 - (a) harga perolehan aset murabahah;*
 - (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan*
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;*
- (b) jangka waktu murabahah tangguh.*
- (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

KETENTUAN TRANSISI

42. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

43. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

44. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

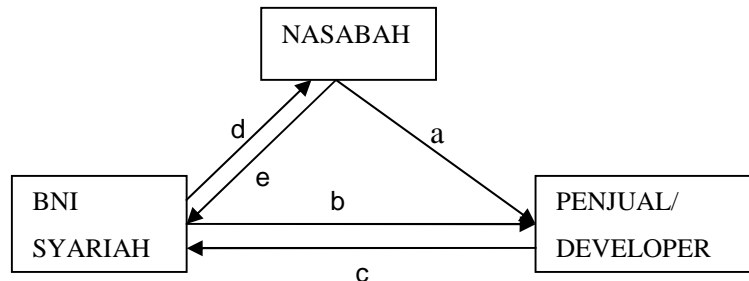
A. Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pada saat ini hanya ada dua macam pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan *murabahah* KPR dan pembiayaan *murabahah* multiguna mobil. Kedua produk ini mempunyai ketentuan berbeda. Kebijakan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dalam hal pembiayaan ini adalah menyalurkan kreditnya maksimal 80% dari total harga barang sehingga nasabah harus membayar uang muka kepada penjual. Kebijakan ini dilakukan agar nasabah juga merasa ikut serta dalam pembelian barang tersebut. Selain itu hal itu juga dilakukan untuk menjaga prinsip kehati-hatian bank¹. Adapun alur pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

¹Tiffany Dwi Hidayana, *direct sell bagian murabahah/griyahasana*, wawancara, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, 25 April 2013.

Gambar VI.1.
Pembiayaan *Murabahah* KPR

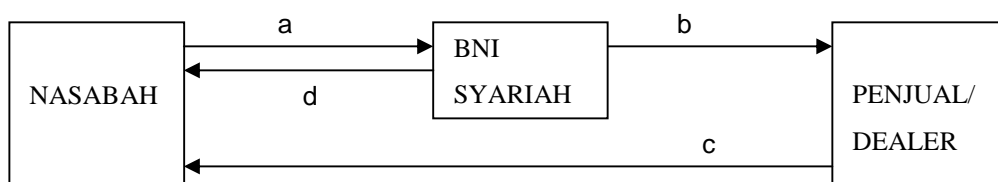


Sumber: PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru

Keterangan gambar:

- Nasabah membayar uang muka kepada penjual sebesar minimal 20%, sesuai kekurangan pembiayaan dari bank
- Bank membayar sisa uang pelunasan pembayaran rumah kepada penjual secara kontan
- Penjual menyerahkan hak tanggungan rumah kepada bank
- Bank memberikan hak rumah kepada nasabah, tetapi surat kepemilikan rumah dibawa bank sebagai agunan
- Nasabah membayar cicilan pembiayaan kepada bank syariah

Gambar VI.2.
Pembiayaan *Murabahah* Multiguna



Sumber: PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru.

Keterangan gambar:

- a. Nasabah membayar uang muka kepada bank atas permohonan pembiayaan barang multiguna dan berikutnya membayar cicilan angsuran
- b. Bank membeli secara tunai barang yang dipesan nasabah
- c. Penjual atau *dealer* menyerahkan barang ke nasabah
- d. BNI Syariah menyerahkan hak barang tersebut kepada nasabah, tetapi BPKB dibawa oleh bank sebagai jaminan

Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank BNI Syariah

Kantor Cabang Pekanbaru :

- a. Kegiatan Pra Akad

Setelah hasil Rapat Komisi Audit (Rakomdit) menyetujui pengajuan pembiayaan, maka selanjutnya bagian *Financing Service* memberitahukan kepada nasabah. Pemberitahuan tersebut terdiri dari perjanjian pengikatan (akad) berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi nasabah. Untuk nasabah dalam masa pra akad ini harus membuka rekening tabungan serta membayar biaya pra realisasi. Cara membuka rekening tabungan adalah mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada *costumer service*. Setelah itu *costumer service* membuatkan CIF (*Customer Identification Form*). Bentuk dari CIF ini adalah nomor yang sifatnya unik yaitu masing-masing nasabah memiliki CIF yang berbeda-beda. Dan masing-masing nasabah hanya memiliki satu CIF walaupun

memiliki lebih dari satu tabungan pada bank yang sama. Dalam CIF ini berisi data lengkap nasabah. Baru setelah itu diberikan nomor rekening².

Setiap produk tabungan memiliki nomor rekening yang berbeda. Sehingga jika nasabah ingin membuka lebih dari satu produk tabungan maka akan mempunyai lebih dari satu nomor rekening sesuai jumlah tabungan yang dibuka. Baru setelah mempunyai buku tabungan, nasabah membayar biaya pra realisasi kepada teller.

Setelah membuat CIF dan Nomor Rekening, bagian *Customer Service* memberikan data tersebut kepada bagian *Financing Administration*. Bagian *Financing Administration* mendapat dua input data yaitu dari *Customer Service* terkait data pembukaan fasilitas tabungan dan dari bagian *Financing Service* terkait data pengajuan pembiayaan. Bagian ini kemudian membuat *Customer Facility Number* terkait pembiayaan yang diajukan. Isi dari CFN adalah³:

- 1) Harga jual bank kepada nasabah
- 2) Tanggal akad
- 3) Data nasabah
- 4) Tanggal jatuh tempo

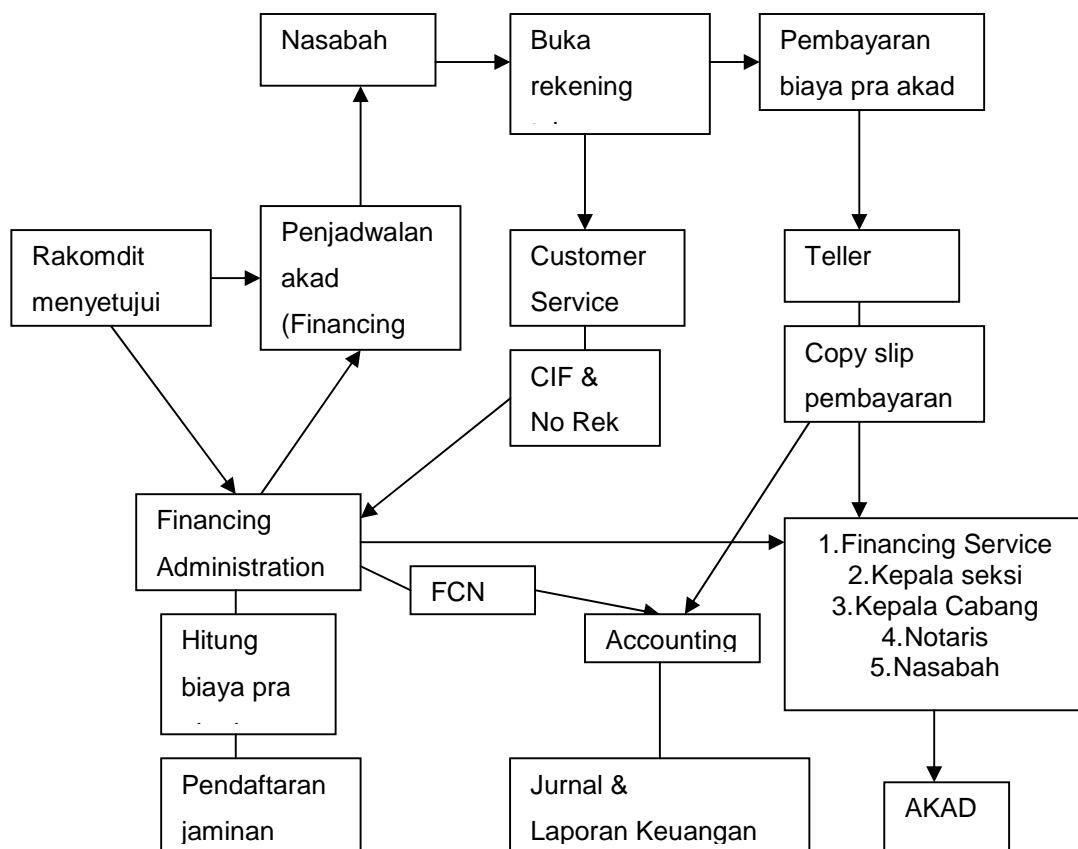
Kegiatan kedua yang dilakukan bagian *Financing Administration* ini adalah melakukan pemeliharaan jaminan. Kegiatan tersebut adalah mendaftarkan jaminan yang akan diberikan nasabah. Dan terakhir merinci biaya-biaya yang harus dibayar nasabah. Perincian biaya dilakukan sebelum nasabah membuka

² Hamdan Junaidi Sitompul, *direct sell bagian murabahah/griyahasanah*, wawancara, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, 26 April 2013.

³ Tiffany Dwi Hidayana, *direct sell bagian murabahah/griyahasanah*, wawancara, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, 26 April 2013.

rekening tabungan dan membayar biaya pra akad sehingga nasabah mengetahui besarnya biaya yang harus dibayar. Dengan kata lain bahwa kegiatan pembiayaan bersifat paralel. Dapat digambarkan kegiatan pra akad adalah sebagai berikut :

Gambar IV.3.
Kegiatan Pra Akad



Sumber: PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam masa pra akad adalah membayar biaya pra akad. Biaya tersebut terdiri dari⁴:

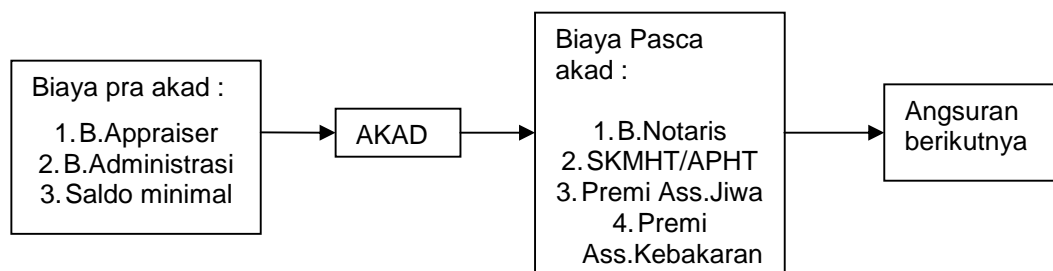
- a) Biaya notaris
- b) SKMHT atau APHT
- c) Biaya Appraisal

⁴Dokumen Pembiayaan *murabahah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

- d) Premi Asuransi Jiwa
- e) Premi Asuransi Kebakaran
- f) Biaya administrasi
- g) Angsuran I & Saldo minimal

Dengan demikian maka nasabah dapat dikatakan terdzalimi karena harus membayar biaya yang belum seharusnya dibayarkan. Padahal bisa saja syarat untuk nasabah cukup dengan membuka rekening dan jika perlu biaya akad yang jika tidak terealisasi dapat dikembalikan. Biaya tersebut diantaranya adalah biaya appraisal, biaya administrasi dan saldo minimal. Sedangkan biaya yang lain dibayarkan saat akad telah terjadi. Meskipun cara tersebut sedikit menyulitkan karena nasabah harus melakukan minimal dua kali pembayaran dalam satu bulan akad tersebut, yaitu membayar biaya pra akad dan biaya pasca akad. Sehingga rancangan alur ideal pembayaran yang dibayarkan nasabah dalam masa akad tersebut adalah:

Gambar IV.4.
Alur Pembayaran



Sumber: PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru

Dengan alur tersebut maka nasabah tidak dibebankan dengan biaya yang seharusnya belum ditanggungnya dalam masa pra akad. Teknis pembayaran biaya pasca akad dapat dilakukan pada saat hari berlangsungnya akad sehingga proses

pencairan dapat dipercepat. Dengan demikian maka proses pasca akad seperti pembukaan CFN dapat dilakukan secepatnya sebagaimana ketika pemberlakuan pembukaan fasilitas tersebut pada model pembiayaan yang berlaku sekarang.

b. Kegiatan Pasca Akad

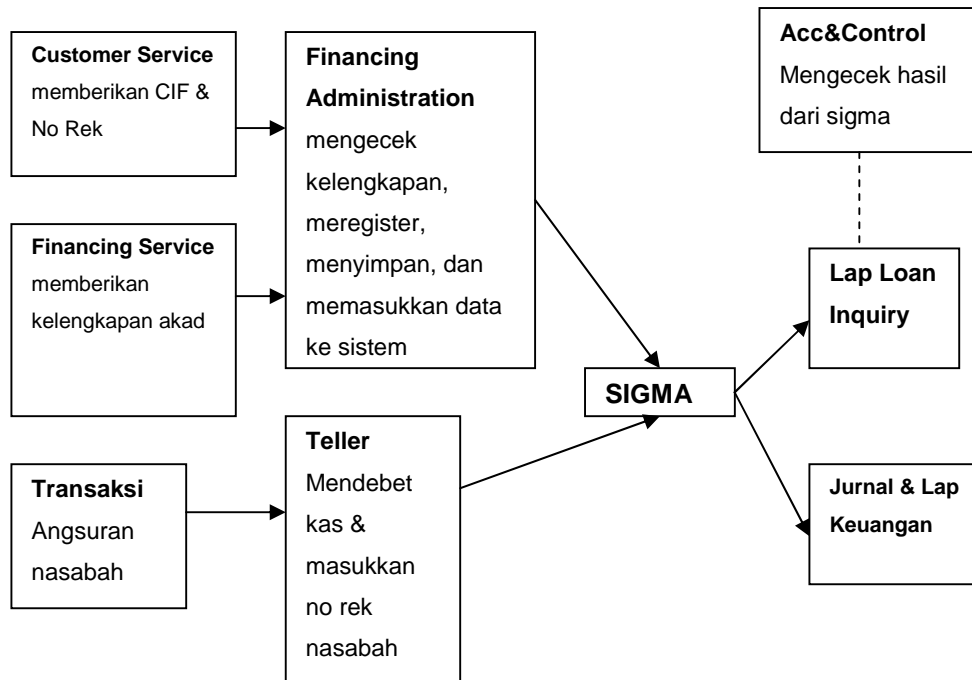
Setelah akad berlangsung, kepala cabang memerintahkan bagian *Financing Administration* untuk menindak lanjuti kegiatan pasca akad. Kemudian bagian ini melakukan beberapa kegiatan terkait kegiatan pasca akad yaitu:

- 1) Meregister dan menyimpan dokumen akad dan jaminan baik *soft copy* maupun *hard copy*. Serta mengurus kelengkapan akad dan fasilitas yang akan diperoleh nasabah seperti Akta tanah, IMB, Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran
- 2) Memasukkan data nasabah ke sistem yang dikenal dengan CFN (*Customer Facility Number*). Yang selanjutnya setiap transaksi langsung masuk ke sistem
- 3) Membuat memo pendebetan biaya reallisasi dan memo pencairan dana pembiayaan. Memo tersebut diserahkan kepada kepala cabang untuk diotorisasi

Sistem administrasi dan akuntansi di BNI Syariah menggunakan sistem sigma. Setelah data-data yang diperlukan dimasukkan ke dalam sistem, maka secara otomatis setiap pengolahan transaksi akan dikerjakan oleh sistem. Sedangkan bagian yang terkait hanya memasukkan transaksi yang terjadi⁵.

⁵ Hamdan Junaidi Sitompul, *direct sell bagian murabahah/griyahanah, wawancara*, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, 26 April 2013.

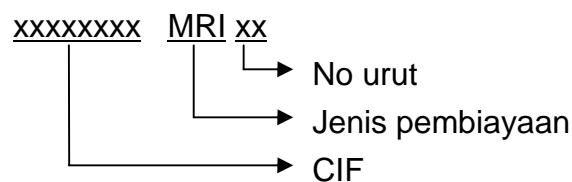
Gambar IV.5.
Sistem Akuntansi



Sumber: PT.Bank BNI Syariah Pekanbaru.

Semua proses transaksi dilakukan oleh sistem sigma. Cara kerja sistem ini adalah dengan menggunakan kode nasabah. Kode nasabah yang dibuat untuk dimasukkan ke dalam sistem itulah yang disebut *Customer Facility Number* (CFN).

Berikut adalah ilustrasi *Customer Facility Number*:



Nomor CFN ini untuk seterusnya menjadi kode pembiayaan untuk satu nasabah. Sehingga yang muncul di jurnal ketika nasabah membayar angsuran adalah kode nomor tersebut, bukan nama nasabah. Hal ini untuk menjaga

kerahasiaan nasabah. Data CFN ini juga berfungsi untuk mengetahui dan memantau semua hal terkait pembayaran nasabah.

Berikut ini adalah sebagian tampilan layar hasil masukan dari pembukaan *Customer Facility Number*⁶:

LOAN INQUIRY NASABAH PEMBIAYAAN				
BNI SYARIAH	BNI7003	D19701BO03	5-10-2005(b)	8:27:01(c)
KANTOR CABANG PEKANBARU(a)				B104KN7M
LOAN INQUIRY				ACTIVE(d)
Loan No.(e)	: xxxxxxxx	Cust.Fac.No(f):	xxxxxxxx MR1 xx	Branch : xxx
Loan Holder(g)	: Fulan Bin Fulan	xxxxxxxx(h)		Ccy.(i) : IDR
Loan Type (j)	: ARM1F	Proc. :	8	Cacl. : 360
Start Date(k)	: 27-09-2005	Maturity Date(l)	: 27-09-2015	A/O : MS
B.Hasil(%) (m)	: xxxxxxxx	Penalty (%) (n)	: .0005	Base :
Repayment(o)	: xxxxxxxx	Fac. Sts(p)	: ACTIVE	Accrue : 1
-----PRINCIPAL-----MARGIN-----				
Original Amount	:	xxxxxxxx(q)	xxxxxxxx(r)	
Paid/Amort. Amount	:	xxxxxxxx(s)	xxxxxxxx(t)	
Outstanding	:	xxxxxxxx(u)	xxxxxxxx(v)	
Past Due	:	0	0	
Write Off (W/O)	:	0	0	
Paid Un-Authorized	:	0	0	
W/O Un-Authorized	:	0	0	
-----PENALTY-----FEE-----				
Paid	:	0	0	
Paid Un-Authorized	:	0	0	
Write Off (W/O)	:	0	-----O/S Pokok (Net)-----	
W/O Un-Authorized	:	0	xxxxxxxx(w)	
F3-Exit F5-RepaySch F6-Activity F7-AccHst F8-PastDue F10-NextScr				

⁶ File Copy Pembiayaan *murabahah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Keterangan tampilan layar *loan inquiry*:

- a. BNI SYARIAH KC PEKANBARU: Nama institusi atau kantor cabang syariah
- b. Tanggal saat membuka tampilan layar
- c. Jam saat membuka tampilan layar
- d. Menunjukkan status keadaan layar apakah aktif atau tidak
- e. Loan No.: Nomor pembiayaan
- f. CFN (*Customer Facility Number*) atau nomor kode pembiayaan nasabah
- g. *Loan Holder*: Nama nasabah pembiayaan
- h. Nomor CIF (*Customer Identification Form*) yang berisi data-data nasabah pembiayaan
- i. Ccy (*currency*): Penghitungan mata uang yang digunakan dalam contoh IDR (Indonesian Rupiahs)
- j. *Loan Type*: Tipe pembiayaan nasabah
- k. *Start Date*: Tanggal persetujuan pencairan dan akad
- l. *Maturity Date*: Tanggal akhir kerjasama pembiayaan
- m. Margin atau Bagi Hasil: Prosentase margin yang diperoleh BNI Syariah sesuai kesepakatan
- n. *Penalty*: Prosentase denda jika nasabah terlambat dalam pembayaran. Angka tersebut adalah prosentase denda tiap hari keterlamabatan
- o. *Repayment*: Cicilan yang harus dibayarkan nasabah dalam satu kali angsuran
- p. *Fac. Sts*: Status pembiayaan sampai saat tanggal tersebut

- q. *Original Amount Principal*: Harga jual bank kepada nasabah yang terdiri dari harga pokok ditambah margin
- r. *Original Amount Margin*: Nilai total margin yang akan diterima bank
- s. *Paid or Amort. Amount Principal*: Jumlah rupiah yang telah dibayarkan nasabah kepada bank
- t. *Paid or Amort. Amount Margin*: Margin yang telah diterima bank dari jumlah rupiah yang telah dibayarkan nasabah
- u. *Outstanding Principal*: Sisa jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh nasabah
- v. *Outstanding Margin*: Margin yang masih akan diterima oleh bank dari sisa pembayaran (keuntungan ditangguhkan)
- w. Harga pokok yang masih harus dibayar oleh nasabah

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Original Amount Margin* (r) = Margin (m) x Pokok (w)
- *Original Amount Principal* (q) = Pokok (w) + *Original Amount Margin* (r)
- *Repayment* (o) = *Original Amount Principal* (q): [lama angsuran (l - k) x 12]

Setelah terjadi pembayaran angsuran maka secara otomatis (oleh sistem) nilai pokok penjualan (w) akan berkurang sesuai nilai pokok yang telah dibayarkan.

Berikut ini adalah ilustrasi penghitungan angka-angka tersebut:

Harga pokok sebuah rumah yang dibiayai bank kepada nasabah adalah Rp 120.000.000,-. Jangka waktu pembiayaan tersebut adalah 10 tahun. Margin yang akan diperoleh bank sesuai kesepakatan adalah 10% flat

selama masa angsuran. Sehingga perhitungan dari ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Original Amount Margin* (r)
 - $\Leftrightarrow [10\% \times 10\text{thn}] (m) \times \text{Rp } 120.000.000 (w)$
 - $\Leftrightarrow \text{Rp } 120.000.000,-$
- *Original Amount Principal* (q)
 - $\Leftrightarrow \text{Rp } 120.000.000 (w) + \text{Rp } 120.000.000 (r)$
 - $\Leftrightarrow \text{Rp } 240.000.000,-$
- *Repayment* (o)
 - $\Leftrightarrow \text{Rp } 240.000.000 (q) : (10 \text{ thn} \times 12 \text{ bln})$
 - $\Leftrightarrow \text{Rp } 2.000.000,- \text{ per bulan}$

Misalkan pembayaran angsuran telah berlangsung selama 5 bulan sehingga nasabah telah membayar 5 kali angsuran yang besarnya:

$$\text{Rp } 2.000.000,- \times 5 \text{ bln} = \text{Rp } 10.000.000,-$$

Sehingga secara otomatis (oleh sistem) setelah pengkreditan angsuran oleh teller maka jumlah pokok (w) yang muncul sebesar:

$$\text{Rp } 120.000.000 - [\text{Rp } 1.000.000 \times 5] = \text{Rp } 115.000.000,-$$

Jumlah pokok tersebut terus akan berkurang sesuai jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Kemudian angka lain yang akan terus berubah adalah:

- *Paid or Amort. Amount Principal* (s)
 - $\text{Rp } 2.000.000 (o) \times 5 = \text{Rp } 10.000.000,-$ (berubah sesuai jumlah rupiah angsuran yang dibayarkan nasabah)
- *Paid or Amort. Amount Margin* (t)

$\text{Rp } 1.000.000 \times 5 = \text{Rp } 5.000.000,-$ (keuntungan yang telah terealisasi diterima bank)

- *Outstanding Principal* (u)

$\text{Rp } 240.000.000 \text{ (q)} - \text{Rp } 20.000.000 \text{ (s)} = \text{Rp } 220.000.000,-$ (sisa angsuran yang harus dibayar nasabah)

- *Outstanding Margin* (v)

$\text{Rp } 120.000.000 \text{ (r)} - \text{Rp } 5.000.000 \text{ (t)} = \text{Rp } 115.000.000,-$ (keuntungan yang masih ditangguhkan)

Angka-angka tersebut diatas digunakan untuk mengetahui posisi pembiayaan masing-masing nasabah. Sedangkan untuk mengetahui lancar tidaknya pembayaran angsuran maka hal tersebut dapat dilihat pada halaman kedua CFN yang berisi tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya.

Kegiatan bagian *Financing Administration* berikutnya adalah pemeliharaan jaminan. Kegiatan ini berupa pendaftaran jaminan yaitu:

- Jika pembiayaan dalam bentuk KPR maka pendaftaran jaminan berisi harga rumah, alamat, surat-surat kepemilikan rumah
- Untuk pembiayaan multiguna mobil atau motor maka pendaftaran jaminan berisikan jenis atau merk, nomor rangka, no mesin, harga dealer dan BPKB

Setelah nasabah membayar biaya pra realisasi dan telah dilakukan akad maka kemudian bagian *Financing Administration* menerbitkan memo pendebetn biaya realisasi KPR BNI Syariah. Memo tersebut diserahkan kepada Kepala Cabang. Lalu setelah diperiksa dan disetujui kepala cabang menyerahkannya ke bagian

akuntansi untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam jurnal setelah dibandingkan dengan copy formulir penyetoran. Disinilah awal kegiatan bagian akuntansi.

Dalam memo pendebetn biaya realisasi ini terdapat perincian biaya yang harus dibayarkan dalam masa pra akad. Jurnal yang tertera dalam memo tersebut akan muncul di jurnal umum secara otomatis oleh sistem setelah bagian *Financing Administration* memasukkan biaya-biaya tersebut ke CFN. Begitu pula ketika menerbitkan memo pencairan dana pembiayaan.

Berikut adalah contoh tampilan jurnal harian BNI Syariah setelah bagian *Financing Administration* melakukan pencairan pembiayaan:

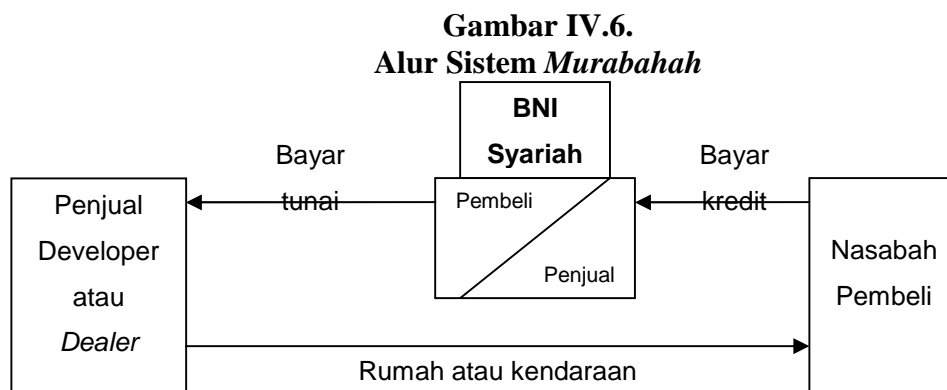
BNI Syariah		Jam : 16.04.04 Tgl : 10-10-2005 Hal : 1		
Wilayah : 01-Jakarta		JOURNAL HARIAN TGL : 10-10-2005		
Cabang : 701-KC Pekanbaru		Ccy : IDR		
Ledger A/C No	Ref	Keterangan	Tgl Posting	Nilai Transaksi
01-701-1114-	O/B	Piutang Murabahah KPR	10-10-2005	240.000.000 DR
01-701-1141-	O/B	Margin Murabahah ditangguhkan-KPR	10-10-2005	120.000.000 CR
01-701-1551-	O/B	Persediaan Murabahah-Rumah	10-10-2005	120.000.000 CR

Uraian diatas adalah penjelasan singkat mengenai sistem sigma yang digunakan di BNI Syariah. Secara umum cara kerja sistem ini telah sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi. Penggunaan sistem ini adalah untuk mempermudah dan mengefisiensikan proses akuntansi. Apabila terjadi kesalahan keluaran dari sistem (*out put*), maka kemungkinan besar kesalahan terjadi pada saat pengguna memasukkan (*input*) data. Untuk itu bagian *Accounting & Control* bertugas memeriksa hasil keluaran tersebut dengan membandingkannya dengan bukti-bukti

transaksi. Setelah itu mencetak jurnal harian serta laporan keuangan harian untuk dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Sistem Pencatatan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

BNI Syariah melakukan dua peran sekaligus dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Yaitu ketika bank berperan sebagai penjual dan ketika berperan sebagai pembeli atau sering disebut dengan sistem *murabahah* paralel. Alur sistem *murabahah* di BNI Syariah adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah

Berikut ini adalah jurnal-jurnal terkait pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah:

Contoh I : Pada 1 Juni 2010, Kevin mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah dengan harga sebuah rumah dengan harga Rp 120.000.000,-. Dimana Kevin membayar uang muka sebesar 10% (Rp 12.000.000) kepada developer, setelah bank melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut Kevin memiliki kesanggupan mengangsur dalam jangka waktu pembiayaan tersebut adalah 10 tahun (120 bulan). Margin yang akan diperoleh bank sesuai kesepakatan adalah 10% flat selama masa

angsuran. Sehingga perhitungan dari ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga rumah} & : \text{Rp } 120.000.000 \\
 \text{Urbun} & : \text{Rp } 12.000.000 \text{ _} \\
 \text{Nilai KPR} & : \text{Rp } 108.000.000 \\
 \text{Margin} & = 10 \% \times 10 \times \text{Rp. } 108.000.000 \\
 & = \text{Rp. } 108.000.000 \\
 \text{Margin per bulan} & = \frac{\text{Rp. } 108.000.000}{120} \\
 & = \text{Rp. } 900.000 \\
 \text{Angsuran Pertahun} & = \frac{(\text{Rp } 108.000.000 \times 10 \% \times 10) + \text{Rp. } 108.000.000}{10} \\
 & = \text{Rp } 21.600.000 \\
 \text{Angsuran per bulan} & = \frac{\text{Rp } 21.600.000}{12} \\
 & = \text{Rp } 1.800.000
 \end{aligned}$$

Maka BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menjurnal sebagai berikut :

a) Saat realisasi pembiayaan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aktiva <i>Murabahah</i>	Rp. 108.000.000	
	Utang pembelian rumah		Rp. 108.000.000

b) Saat penjualan rumah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. 108.000.000	
	Aktiva <i>Murabahah</i>		Rp. 108.000.000

c) Saat pembayaran kepada developer

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang pembelian rumah	Rp. 108.000.000	
	Kas		Rp. 108.000.000

d) Saat pembayaran angsuran atau penerimaan angsuran dari Kevin

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Tabungan Nasabah / Kevin	Rp 1.800.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 1.800.000

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 1.800.000	
	Aktiva <i>Murabahah</i>		Rp 1.800.000

e) Saat pengakuan pendapatan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Pendapatan diterima di muka	Rp. 900.000	
	Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		Rp. 900.000

f) Saat pelunasan angsuran

Dalam pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh Kevin
(nasabah) yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan
(piutang *murabahah*)

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Tabungan Nasabah / Kevin	Rp 1.800.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 1.800.000

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Pendapatan diterima di muka	Rp. 900.000	
	Pendapatan margin		Rp. 900.000

g) Saat keterlambatan angsuran

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang <i>Murabahah</i> jatuh tempo	Rp 1.800.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 1.800.000
	Margin <i>Murabahah</i> ditangguhkan	Rp. 900.000	
	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> akrual		Rp. 900.000
	Kas / rekening nasabah	Rp 1.800.000	
	Piutang <i>Murabahah</i> jatuh tempo		Rp 1.800.000
	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> akrual	Rp. 900.000	
	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Rp. 900.000

h) Saat pelunasan angsuran lebih awal

Pada bulan November 2013 Kevin (nasabah) melakukan pelunasan lebih awal maka Kevin membayar sisa pokok dan ditambah margin pada satu bulan berikutnya, pelunasan tersebut terhitung pada angsuran ke-30 (lampiran).

Sisa Pokok Angsuran = Rp 243.000.000

Margin bulan berikutnya = Rp 900.000 +

Total = Rp 243.900.000

Pengakuan pokok dan margin dilakukan secara merata dan flat selama angsuran. Apabila nasabah melakukan pembayaran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan margin dilakukan secara proposional juga atau sebanding dengan porsi margin yang terkandung dalam angsuran

normalnya. Maka BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menjurnal transaksi pelunasan sebagai berikut :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp 243.900.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 243.900.000

Kemudian dalam pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran Kevin (nasabah) yang nilainya sebesar jumlah seluruh isi pokok pembiayaan (piutang *murabahah*)

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas / rekening nasabah	Rp 243.900.000	
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp 243.900.000

Contoh II : Pada 1 maret 2012, Ibu Hj Suryani mengajukan permohonan pembiayaan yakni berupa kendaraan motor seharga Rp 10.000.000,-. Dimana Ibu Hj Suryani mengajukan permohonan pembiayaan tersebut selama 12 bulan dan membayar uang muka sebesar 10% (Rp 1.000.000) kepada bank, setelah bank melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut Ibu Hj Suryani memiliki kesanggupan mengangsur dalam jangka waktu pembiayaan tersebut adalah 1 tahun (12 bulan). Margin yang akan diperoleh bank sesuai kesepakatan

adalah 25% flat selama masa angsuran Sehingga perhitungan dari ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Harga Kenndaraan motor	:	Rp 10.000.000
Urbun	:	<u>Rp 1.000.000</u> -
Pokok Pembiayaan	:	Rp 9.000.000

Margin	=	25% x 1 x Rp 9.000.000
	=	Rp 2.250.000

Margin per bulan	=	<u>Rp 2.250.000</u>
		12
	=	Rp. 187.500

Angsuran per bulan	=	<u>Rp 9.000.000 + Rp 2.250.000</u>
		12
	=	Rp 937.500

Dengan demikian setiap pembayaran angsuran Rp 937.500, terdapat didalamnya margin dan pokok sebesar Rp 750.000, dengan perhitungan

Pokok per bulan	=	Rp 937.500 - Rp. 187.500
	=	Rp 750.000

Maka BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menjurnal transaksi sebagai berikut :

a) Saat penerimaan uang muka

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Rp. 1.000.000	
	Kewajiban nasabah/Urbun		Rp. 1.000.000

b) Saat pembelian Kendaraan motor pesanan nasabah

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Persediaan asset <i>Murabahah</i>	Rp. 10.000.000	
	Kas		Rp. 10.000.000

c) Saat pembayaran angsuran atau penerimaan angsuran dari nasabah dan pengakuan keuntungan atau pendapatan margin

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 750.000	
	Aktiva <i>Murabahah</i>		Rp 750.000
	Pendapatan diterima di muka	Rp. 187.500	
	Pendapatan margin Murabahah		Rp. 187.500

B. Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Setelah melihat perlakuan akuntansi bagaimana mengenai transaksi murabahah yang ada di BNI Syariah Kantor cabang Pekanbaru melalui contoh jurnal pembiayaan murabahahnya, sekarang penulis akan mencoba menganalisa apakah perlakuan akuntansi murabahah yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip yang berlaku pada umumnya, yaitu PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Analisa tersebut disesuaikan dengan contoh jurnal yang ada, berikut dibawah ini analisa yang dapat diambil oleh penulis yaitu:

1. Saat penerimaan uang muka

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru mendapatkan urbun sebagai uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, sedangkan perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102 urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima oleh bank. Jika transaksi murabahah dilaksanakan maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian dari angsuran pembelian). Dalam hal ini dapat dikatakan pencatatan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pada saat penerimaan urbun telah sesuai dengan PSAK No. 102

2. Diskon pembelian asset

Jika PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru mendapatkan potongan dari penjual Developer atau *Dealer*, maka potongan itu hak nasabah. Apabila potongan itu terjadi setelah akad, maka pembagian potongan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat didalam akad, sedangkan perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102 jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon itu hak nasabah. Apabila diskon itu terjadi setelah akad, maka pembagian potongan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad, jika tidak diatur dalam akad maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Dalam hal ini dapat

dikatakan pencatatan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pada potongan asset murabahah telah sesuai dengan PSAK No. 102

3. Saat pembayaran angsuran dan pengakuan pendapatan

Perlakuan Akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pada saat piutang murabahah dicatat sebesar harga pokok ditambah dengan harga margin/keuntungan merupakan selisih antara harga jual dengan nilai persediaan/harga pokok, sedangkan perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102 pada saat akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini pencatatan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pada piutang murabahah belum sepenuhnya sesuai dilihat dari penetapan margin/keuntungan dengan PSAK No. 102.

4. Saat keterlambatan angsuran

Perlakuan Akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru apabila dalam jangka waktu angsuran tersebut nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad tidak dikenakan denda, namun hal ini bisa berdampak pengurangan terhadap kriteria nasabah untuk masa yang akan datang, sedangkan perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102 jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dikenakan denda dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Dalam hal ini dapat dikatakan pencatatan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pada piutang murabahah belum sesuai dengan PSAK No. 102.

5. Saat pelunasan angsuran lebih awal

Perlakuan Akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru apabila dalam jangka waktu angsuran tersebut nasabah melakukan pelunasan atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran, nasabah tidak mendapat potongan, sedangkan perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102 potongan pelunasan murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Dalam hal ini dapat dikatakan pencatatan yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru pada potongan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati belum sesuai dengan PSAK No. 102.

6. Saat pelunasan angsuran tepat waktu

Perlakuan Akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru apabila dalam jangka waktu angsuran tersebut nasabah melakukan pelunasan tepat waktu, nasabah sebesar sisa saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, sedangkan perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102 akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian perbandingan PSAK No. 102 dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Pekanbaru dalam Penerapan akuntansi Murabahah

	PSAK 102	Bank
1	Murabahah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli	Murabahah adalah akad penyediaan barang berdasarkan system jual beli, dimana bank sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati
2	Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan	Bank hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan
3	Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh	Bank menerapkan Pembayaran secara tunai atau tangguh
4	Harga yang disepakati dalam murabahah Adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus Diberitahukan	Harga yang disepakati Dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan
5	Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban	Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: a. Jika terjadi sebelum akad maka mengurangi harga perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon

	<p>penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon</p> <p>c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan murabahah</p> <p>d. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai pendapatan operasional lain perolehan</p>	<p>c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan murabahah</p>
6	<p>Pembeli dapat meminta uang muka sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati</p>	<p>Bank meminta urbun sebagai uang muka dari nasabah</p>
7	<p>Keuntungan murabahah diakui :</p> <p>1. Jika akad murabahah tidak Melebihi satu Tahun maka Keuntungan diakui Pada saat penyerahan aset murabahah</p> <p>2. Jika akad murabahah melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya yaitu :</p>	<p>Keuntungan murabahah Diakui sesuai dengan kebijakan internal bank :</p> <p>a. Jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui menggunakan metode efektif anuitas sesuai jangka waktu</p> <p>b. Jika akad murabahah melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya yaitu :</p> <p>1) Murabahah dengan resiko relative kecil,</p>

	<p>1) Murabahah dengan resiko relatif kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a</p> <p>2) Murabahah dengan resiko relative besar, Keuntungan diakui secara Proporsional dengan Besaran kas Yang berhasil Ditagih dari Piutang murabahah</p> <p>3) Murabahah dengan resiko Cukup besar, Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih</p>	<p>keuntungan diakui sama dengan poin a</p> <p>2) murabahah dengan resiko relative besar, keuntungan Diakui secara proporsional atau Dengan menggunakan metode Proporsional sesuai periode akad</p> <p>3) murabahah dengan resiko cukup besar, Keuntungan diakui Saat seluruh Piutang murabahah Berhasil ditagih</p>
8	<p>Potongan murabahah :</p> <p>a. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati tidak diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.</p> <p>b. Pemberian potongan Pelunasan piutang Murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <p>1) Diberikan pada Saat pelunasan, Yaitu penjual mengurangi Piutang</p>	<p>Potongan murabahah :</p> <p>a. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.</p> <p>b. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <p>1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah</p> <p>2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayar kan potongan pelunasannya kepada nasabah.</p> <p>d. Potongan angsuran murabahah diakui</p>

	<p>murabahah dan keuntungan murabahah.</p> <p>2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual Menerima pelunasan piutang dari Pembeli dan kemudian Membayarkan potongan Pelunasannya kepada pembeli.</p> <p>c. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:</p> <p>1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang Keuntungan murabahah.</p> <p>2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan Pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.</p>	<p>sebagai berikut:</p> <p>1) Jika disebabkan oleh nasabah yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.</p> <p>2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran nasabah, maka diakui sebagai beban.</p>
9	<p>Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.</p>	<p>Denda tidak dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad.</p>
10	<p>Penyajian :</p> <p>a. Pada pihak penjual:</p>	<p>Penyajian pada pihak bank saja :</p> <p>a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai</p>

	<p>Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p> <p>b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.</p> <p>b. Pada pihak pembeli: Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah.</p>	<p>bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p> <p>b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.</p> <p>c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.</p>
11	<p>Pengungkapan :</p> <p>a. Pada pihak penjual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Harga perolehan asset murabahah. 2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak. 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. <p>b. Pada pihak pembeli</p>	<p>Pengungkapan pada pihak bank saja :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Harga perolehan asset murabahah b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

	<p>1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah</p> <p>2) Jangka waktu murabahah tangguh</p> <p>3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menggunakan sistem sigma. Sistem ini menggunakan kode *Customer Facility Number* yang berasal dari kode nasabah yang telah dibuat, sistem ini yang nantinya menjadi kode pembiayaan untuk satu nasabah, apabila nasabah membayar angsuran maka pada jurnal muncul kode nomor tersebut bukan nama nasabah, ini juga bagian dari menjaga kerahasiaan nasabah. Data CFN juga berfungsi untuk memantau semua hal yang terkait dalam pembayaran nasabah.
2. Secara pelaporan, akuntansi yang dilakukan BNI Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman akuntansi perbankan syariah pada PSAK 102, antara lain :
 - a) Saat Pembayaran Angsuran dan Pengakuan Pendapatan
 - b) Saat Keterlambatan Angsuran
 - c) Saat Pelunasan Angsuran Lebih Awal.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sistem sigma yang diterapkan pada sistem akuntansi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru sangat membantu dan dipandang efektif bagi perusahaan sehingga sangat perlu dipertahankan, namun tetap secara berkesinambungan mengontrol sistem akuntansi yang dijalankan. Diperlukan juga pengembangan sistem akuntansi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berkembang. Serta segera melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan kerja pada sistem yang digunakan.
2. Mempertahankan pencatatan yang telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan meninjau ulang pencatatan yang belum sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah sehingga pencatatan akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru murni telah sesuai tanpa ada keraguan terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. Akhyar, *Akuntansi syariah:Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Basir, Cik, Drs. S.H. M.H.I, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dipengadilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002.
- Fike Mai Mandasari, *Sistem Pengendalian Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Bhakti Jaya Malang*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Karim, Adiwarman, Ir. S.E, M.B.A, M.A.E.P, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, Jakarta: Gema insani, 2001.
- _____, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007
- _____, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001,
- Laksmiana, Yusak, *Account officer Bank Syariah Memahami Praktik Proses Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Mahmud, Amir, *Bank syariah teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Miyono, Slamet, *Memahami Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, , Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Rianto, Nur al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, 2010.

- Rivai, Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Bandung: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Saeed Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan dalam islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suwiknyo, Dwi, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafri, Sofyan, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Taufik Arsad Mawardi, *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Jakarta*, Jakarta: STEI SEBI, 2005.
- Trianita Gusman, *Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP) Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai*, Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2011.
- Triuwono, Iwan, *Perspektif metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Yaya, Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Zulkifli, Sunarto, *Panuan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Bank Indonesia, 2012, Statistik Perbankan Syariah, <http://www.bi.go.id>
- _____, 2012, Statistik Perbankan Indonesia, <http://www.bi.go.id>
- Bank BNI Syariah, 2010, *Annual Report*, www.bnisyariah.co.id
- _____, 2011, *Annual Report*, www.bnisyariah.co.id

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi *Murabahah*, www.abufadilah.files.wordpress.com

Imamul Muttaqin, 2010, Metode Deskriptif, www.blog.uin-malang.ac.id

Majelis Ulama Indonesia, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 13/DSN-

MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*, www.mui.or.id

_____, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa Nomor 16/DSN-

MUI/IX/2000 Tentang Aturan Mengenai Diskon Dalam *Murabahah*,

www.mui.or.id

_____, 2000, Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 17/DSN-

MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-

menunda Pembayaran, www.mui.or.id

_____, 2010, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang *Murabahah*, www.mui.or.id

Wikisource, 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998,

www.id.wikisource.org

Zikri, 2012, Teknik Analisis Data, www.pakguruonline.pendidikan.net